
IMPLEMENTASI ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Bakhrur Rokhman¹, Denok Kurniasih², Tobirin³,

^{1,2,3}Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Email: bakhrurrokhman@mhs.unsoed.ac.id¹, denok.kurniasih@unsoed.ac.id²,

tobirin@unsoed.ac.id³,

Abstrak

Etika diartikan sebagai gagasan atau ajaran moral yang harus dihormati oleh pegawai negeri di sektor publik. Etika mengacu pada prinsip-prinsip perilaku yang baik atau kode etik yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan publik. Menurut definisi, etika adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan ajaran moral dalam perilaku manusia, manfaat dan kerugian dari berbagai tindakan, dan alasan moral atas sikap, perilaku, dan perilaku yang harus dianut atau dihindari oleh para profesional kesehatan. "Penerapan Etika Administrasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia" merupakan kajian kualitatif yang melihat peran etika administrasi publik dalam terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Penelitian ini mengkaji pengalaman di beberapa organisasi pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang berarti tujuan utamanya adalah mengamati fenomena dan menyelidiki makna yang mendasarinya. Pemilihan metodologi kualitatif didasarkan pada kemampuannya dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai peristiwa. Penelitian kualitatif memfasilitasi pemahaman tentang komponen penting suatu peristiwa. Penelitian menunjukkan bahwa etika administrasi publik telah diterapkan di Indonesia pada berbagai tingkat pelayanan publik; Namun, masih banyak permasalahan yang muncul, seperti pelayanan yang tidak jelas, gutan yang tidak sah, dan pengabaian hak dan martabat penerima layanan.

Kata Kunci: Implementasi, Good Governance, Etika, Administrasi

Abstract

Ethics is defined as moral ideas or teachings that must be respected by civil servants in the public sector. Ethics refers to the principles of good behavior or codes of conduct that public service providers must adhere to. By definition, ethics is a branch of philosophy that deals with moral precepts in human behavior, the benefits and harms of various actions, and the moral reasons for the attitudes, behaviors, and behaviors that health professionals should adopt or avoid. "Application of Public Administration Ethics in Realizing Good Governance in Indonesia" is a qualitative study that looks at the role of public administration ethics in creating effective and efficient public services. This research examines experiences in several public service organizations in Indonesia. This research uses a qualitative methodology, which means the main aim is to observe phenomena and investigate their underlying meaning. The choice of qualitative methodology is based on its ability to provide a comprehensive picture of events. Qualitative research facilitates understanding of the important components of an event. Research shows that public administration ethics has been applied in Indonesia at various levels of public services; However, many problems still arise,

such as unclear services, illegal gutan, and neglect of the rights and dignity of service recipients.

Keywords: *Implementation, Good Governance, Ethics, Administration*

PENDAHULUAN

Tujuan utama reformasi birokrasi, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), mulai memberikan jalan bagi tata kelola bersama (shared governance) sebagai sarana untuk memperkuat struktur dan prosedur birokrasi yang lebih unggul. Birokrasi, yang terdiri dari beberapa pemangku kepentingan, bertugas mengelola berbagai aspek administrasi pemerintahan (Meini & Istikharoh, 2022). Sistem pemerintahan, infrastruktur, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan elemen lingkungan birokrasi lainnya. Proses transformasi birokrasi yang berlarut-larut menawarkan pengetahuan inklusif untuk merancang kerangka pemerintahan yang lebih efektif. Gagasan reformasi birokrasi baru-baru ini mendapatkan popularitas sebagai sarana untuk meningkatkan berbagai aspek kerangka organisasi pemerintah (Indriyanto & Rosmalia, 2022). Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan standar sumber daya manusia (SDM) yang berpengetahuan dan terampil. Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, kompetensi, moralitas, dan karakter berwibawa yang tinggi menjadi alat reformasi birokrasi Indonesia melalui inovasi dan pengembangan pelayanan yang diberikan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat (View of implementasi otonomi daerah dalam penanganan pandemi Covid-19, n.d.).

Upaya pemerintah melakukan reformasi birokrasi masih menemui berbagai kendala karena menurut saya budaya organisasi dan sistem birokrasi masih kurang memiliki nilai komitmen, akuntabilitas, dan kejujuran. Kualitas sistem informasi dan aparatur juga menjadi titik lemahnya. Perlu dicatat bahwa perbaikan yang dilakukan masih bersifat marginal dan belum memberikan dampak yang diinginkan terhadap kehidupan birokrasi. Pelayanan publik menjadi kunci utama dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. Pelayanan yang berkualitas sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berimplikasi kepada tatanan birokrasi yang baik. Elemen mendasar dalam mencapai tujuan tata pemerintahan yang baik adalah pelayanan publik. Tatanan birokrasi yang baik dapat dipengaruhi oleh proses penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Tentunya perlu didukung dengan sumber daya manusia yang jujur, infrastruktur yang memadai, dorongan dan pengembangan agar sumber daya manusianya semakin termotivasi dan kompeten (Jufita & Meini, 2022). Hal ini juga memerlukan regulasi yang seimbang dalam mengatur sistem pemerintahan, serta kepemimpinan dengan standar yang tinggi untuk kemajuan tata kelola pemerintahan yang baik dalam struktur pemerintahan (Engkus et al., 2021).

Kurangnya inovasi dalam pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap ide pelayanan menjadi kendala utama dalam peningkatan pelayanan publik. Bagaimana mengembangkan layanan inovatif yang meningkatkan penawaran umum. Dapatkah inovasi layanan membantu mengatasi permasalahan pelayanan publik saat ini. Pelayanan publik yang baik dapat dicapai dengan pemerintahan demokratis yang luas dan bebas. Pemerintah menghadapi berbagai kendala dalam upayanya memperluas kapasitas pelayanan dan menjadi pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk kebutuhan masyarakat (Riska Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022).

Berdasarkan sumber data hasil survei KPPOD dan BKPM, Kota Yogyakarta mempunyai persentase terbesar dari 10 kota dengan pelayanan perizinan terbaik pada tahun 2009 (74,6%), diikuti oleh Kota Banda Aceh (65,9%) dan sejumlah kota lainnya dengan persentase berkisar antara 60% hingga 45%. Pematang Siantar dengan persentase 41,1%

menempati peringkat pelayanan perizinan terendah di antara sepuluh kota teratas. Kurangnya perbaikan layanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdampak pada hal ini. Padahal, inovasi yang dapat memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja lebih baik diperlukan untuk meningkatkan beberapa bidang pelayanan publik.

Dari tingkat tertinggi hingga terendah, organisasi pemerintah bertanggung jawab atas pengembangan layanan yang signifikan (Nugroho et al., 2023). Peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik memberikan pembatasan terhadap pengulangan inovasi, sehingga gerak dinamis proses tersebut terkesan “kaku” dan terbatas.

Merupakan hak warga negara untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Warga negara mempunyai hak-hak yang melekat, yang mencakup kemampuan untuk mengevaluasi hak-hak mereka, mencari perlindungan atas hak-hak tersebut, dan mengajukan tindakan hukum terhadap penyedia layanan. Adanya mekanisme suara dan pemberangkatan dapat membantu kinerja pelayanan publik. Exit menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai pilihan untuk memilih lembaga lain jika kualitas layanannya rendah. Sementara itu, mekanisme suara mempunyai peluang untuk mengevaluasi layanan yang ditawarkan kepada penyedia layanan. Kabupaten Jembrana merupakan salah satu daerah yang menerapkan inovasi pelayanan di bidang pendidikan, antara lain inovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan. Kabupaten Jembrana menerapkan beasiswa lengkap untuk seluruh siswa sekolah dasar, negeri, swasta, hingga sekolah menengah atas, sebagai bagian dari inovasi pendidikannya. Di sisi lain, agar sumber daya pendidikan lebih berdaya saing, juga dilakukan implementasi paralel peningkatan kualitas instruktur. Bersama dengan sejumlah perkembangan lain yang berkaitan dengan institusi pemerintah, pertanian, tenaga kerja dan kependudukan, pertanian, perizinan, dan perekonomian. Kabupaten Saragen menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebab, tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas peningkatan pelayanan pemerintah dan masyarakat, sekaligus memenuhi tuntutan dan harapan bersama (Mandey, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang lebih menekankan pada observasi kejadian dan penyelidikan lebih dalam terhadap signifikansi fenomena tersebut (Limiao & Lestari, 2022). Metode kualitatif dipilih karena dapat membantu dalam menghasilkan gambaran peristiwa secara rinci. Penelitian kualitatif mempromosikan pemahaman elemen inti suatu peristiwa. Oleh karena itu, penelitian kualitatif membantu memperoleh penjelasan yang lebih mendalam selain memenuhi kebutuhan peneliti akan gambaran umum atau penjelasan. Strategi kualitatif ini menggunakan studi literatur sebagai metode pengumpulan data, yang mencakup pengumpulan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah penelitian. Data ini dikumpulkan dari sejumlah publikasi dan majalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan etika administrasi publik mempunyai kaitan langsung dengan penerapan good governance di Indonesia, hal ini terlihat dari hasil penelusuran. Beberapa artikel dan makalah membahas topik ini. Berikut beberapa penemuan terkait dari hasil pencarian:

1. Menjadikan Kebijakan Responsif sebagai Alat Perubahan Pelayanan Publik Tahun 2020, di Masa Pandemi Covid-19, Enny Heriyati dan rekan
Studi ini membahas kesulitan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan tujuan ideal penerapan tata kelola yang baik, khususnya selama pandemi COVID-19.

Studi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mencapai tujuan yang diharapkan dalam menerapkan tata kelola yang baik untuk memerangi epidemi ini. Kurangnya ketegasan dalam merumuskan kebijakan menyebabkan upaya penyelesaian krisis menjadi tertunda.

2. Paradigma Good Governance Hayat 2020: Menuju Shared Governance Melalui Reformasi

Dalam konteks sistem politik Indonesia, esai ini bertujuan untuk menjelaskan gagasan mengenai shared governance dan good governance. Sebagai implementasi kebijakan politik, hal ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap pelayanan publik. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik masih menghadapi tantangan terkait permasalahan pelayanan publik (Budiman et al., 2022). Paradigma tata pemerintahan yang baik terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Investigasi konseptual dan teoritis dasar adalah pendekatan yang diambil. Tata kelola bersama merupakan hasil dari pendekatan ini. Untuk sementara, reformasi birokrasi merupakan agenda krusial yang perlu diwaspadai serendah mungkin. Inovasi pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kualitas, memaksimalkan peningkatan kinerja, dan menjaga profesionalisme. Merasakan pembelajaran inovasi pelayanan publik sebagai langkah praktis dalam mengoptimalkan potensi aparatur. Melalui pengajaran, pelatihan, dan pengembangan potensi diri—yang dititikberatkan pada prinsip pengalaman dan praktik sebagai aktualisasi diri dalam penyelenggaraan pelayanan public inovasi ini berupaya meningkatkan efektivitas aparatur (Achyarsyah et al., 2023).

3. Menggunakan Etika Administrasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance
Nilai-nilai etika lebih dari sekedar keyakinan pribadi seseorang; mereka juga perlu berfungsi sebagai standar dan peta jalan bagi perilaku di lembaga-lembaga maupun di masyarakat. Keyakinan umum dalam etika administrasi publik adalah bahwa seorang administrator publik dapat mengembangkan moral yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip etika pada tugas-tugas yang dilakukannya atas nama masyarakat. Karena komitmen mereka yang kuat untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, administrator publik dengan standar etika yang kuat akan selalu berusaha untuk melindungi diri mereka sendiri agar tidak melanggar hukum. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik sangat erat kaitannya dengan etika. Penyelenggara publik masih terus melakukan penyimpangan yang merupakan salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip etika harus menjadi kerangka kerja dan administrator publik harus benar-benar mematuinya untuk mencapai tata kelola yang baik. Aspek yang paling krusial adalah penerapan etika administrasi publik yang sebaik-baiknya akan membantu seluruh masyarakat dan tidak hanya satu orang saja, khususnya dalam mencapai tata pemerintahan yang baik. Dampak Penerapan Tata Kelola Desa yang Baik di Indonesia melihat dampak penerapan tata kelola desa yang baik di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan kompetensi dan kinerja. Menurut penelitian ini, tingginya tingkat kecurangan dalam pengelolaan uang ditunjukkan oleh tidak memadainya penerapan administrasi desa yang efektif, sehingga menghambat pemerataan pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan (Bisri & Asmoro, 2019).

4. Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance

Upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara terkait dengan produk, layanan, dan dukungan administratif yang ditawarkan oleh penyedia layanan publik dikenal sebagai penyediaan layanan

publik. Kenyataannya, masyarakat masih merasa pelayanan publik belum memuaskan mereka. Hal ini diakibatkan oleh sejumlah masalah yang tidak etis dalam administrasi sektor publik, termasuk kurangnya daya tanggap, keengganan untuk mempertimbangkan rekomendasi dan keluhan, inefisiensi, prasangka, dan kurangnya keramahan. Sekalipun penggunaan etika atau kode etik penyelenggara dalam memberikan pelayanan akan membantu optimalisasi pelayanan publik, namun etika masih dianggap kurang penting dan diabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang dampak kode etik sebagai faktor utama yang mempengaruhi pelayanan publik dalam mewujudkan good governance. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini mengacu pada berbagai publikasi dan artikel tentang fenomena dan objek yang diteliti. Temuan penelitian ini menunjukkan peran penting etika pelayanan publik dalam mencegah perilaku tidak etis dan meminimalkan permasalahan dalam pelayanan publik, yang pada gilirannya menumbuhkan dukungan dan keyakinan masyarakat bahwa penyediaan layanan publik berkualitas tinggi dapat mewujudkan tata kelola yang baik (Nur, Indriyanto, et al., 2023). Memahami konteks penerapan etika administrasi publik yang lebih luas dalam rangka mewujudkan good governance di negeri ini memerlukan pemahaman mengenai kendala-kendala yang dihadapi dan sejauh mana prinsip-prinsip good governance diterapkan di Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh sumber-sumber tersebut.

5. Kode etik pejabat publik menunjukkan bagaimana moralitas dan etika digunakan dalam situasi dunia nyata. Saat ini permasalahan yang paling krusial dalam pengelolaan administrasi publik adalah good governance. Tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang unggul semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat serta seiring dengan kemajuan teknologi informasi dengan kecepatan yang tidak dapat dielakkan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, jujur, dan akuntabel, pemerintah harus menjawab pertanyaan publik yang wajar ini dengan mengubah, memperkuat, menyederhanakan, dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Kehidupan sosial, ekonomi, dan politik serta tumbuhnya masyarakat sipil—khususnya masyarakat yang memiliki nilai-nilai esensial kesucian, kemandirian, dan kemanusiaan—dapat terwujud dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hak asasi manusia, martabat manusia, kewarganegaraan, demokrasi, keberagaman, solidaritas, persatuan dan kesatuan, kemakmuran, kesetaraan, transparansi, kolaborasi, keterlibatan, etika fundamental, akuntabilitas, dan unsur-unsur lain yang merupakan bawaan setiap orang atau organisasi untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan otoriter (Dt, 2003).

A. Etika Pelayanan Public

Pada kenyataannya, dasar-dasar administrasi publik dan etika berbeda. Administrasi publik adalah wilayah pilihan dan perbuatan, sedangkan etika adalah ibu dari filsafat, nilai-nilai, dan moralitas (Subiyanto et al., 2022). Meskipun administrasi negara bersifat konkrit dan perlu mencapai tujuan, etika bersifat abstrak dan berkaitan dengan pertanyaan tentang baik dan buruk (Susilo & Ria, 2022). Meskipun demikian, ada tiga kategori etika dalam organisasi:

1. Etika individu, yaitu ilmu yang mempelajari apakah tindakan seseorang secara moral benar atau salah terhadap orang lain. Mereka yang ingin bekerja sebagai pekerja publik perlu memiliki etika seperti ini.

2. Etika organisasi, atau etika berbasis aturan, tercermin dalam struktur, operasi, dan prosedur organisasi, termasuk sistem yang ketat, denda dan disinsentif berbasis aturan, dan peraturan yang menjadi pedoman.
3. Etika profesi terkait pekerjaan yang berlaku dalam kerangka yang diakui oleh semua orang yang secara etis atau legal ingin menjadi anggota organisasi profesi terkait (Dt, 2003).

Oleh karena itu, etika administrasi publik dapat dipahami sebagai norma-norma profesional dan filosofis (kode etik) atau aturan perilaku yang patut yang harus dipatuhi oleh penyelenggara publik dan penyedia layanan dalam konteks pelayanan publik.

Hal ini membawa pada kesimpulan bahwa etika administrasi publik adalah aturan atau standar manajemen, pedoman moral bagi pegawai atau kerja manajemen, aturan atau standar manajemen yang memberikan pedoman moral bagi administrator publik dalam menjalankan kewajibannya untuk melayani masyarakat. Peraturan etika administrasi negara mencakup berbagai topik, termasuk hubungan masyarakat, keuangan, administrasi, manusia, dan perbekalan dalam rangka memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pelayanan publik (Mandey, 2016). Pelayanan publik mempunyai tiga tujuan utama, yaitu sebagai berikut:

- Pelayanan publik yang relevan dan berkualitas tinggi
- Dari sudut pandang reflektif, etika publik berfungsi sebagai panduan dalam memilih instrumen evaluasi dan kebijakan publik.
- Modalitas Etis, yang menghubungkan aktivitas faktual dengan standar moral.

Rasa hormat diberikan kepada setiap individu yang terkena dampak Kode Etik. Artinya, terdapat keterkaitan antara hak dan kewajiban bagi setiap individu yang tercakup dalam kode etik. Oleh karena itu, misalnya, setiap pejabat publik mempunyai kewajiban untuk menjalankan kewajibannya tanpa merugikan kepentingan pihak ketiga. Kepentingan umum harus selalu didahulukan ketika menyelesaikan konflik antara tugas resmi dan kepentingan pribadi.

Permasalahan Etika Pelayanan Publik

1. *Interacting with Elected Officials*

Akan ada permasalahan khusus dalam interaksi antara otoritas politik terpilih dan pejabat eksekutif, seperti presiden, gubernur, dan bupati/walikota, atau anggota legislatif, DPR atau DPRD. Kebijakan anggota legislatif mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik, namun administrator publik tetap mempunyai kewajiban untuk melapor kepada mereka.

2. *Following Orders*

Terjadi jika seorang pimpinan memerintahkan kepada seorang administrator public sesuatu yang menyalahi etika.

3. *Conflict Interest*

Terjadinya konflik kepentingan, khususnya masalah yang menyangkut keuangan, diantara beberapa pihak pejabat publik.

4. *Whistle Blowing*

Tindakan yang dilakukan oleh anggota sektor publik untuk mengungkap penipuan pihak ketiga yang dilakukan oleh pejabat yang tidak jujur atau organisasinya. Biasanya, pejabat yang lebih tinggilah yang dikecam agar penipuan tersebut diketahui publik. Ini buruk karena masyarakat akan bereaksi negatif terhadapnya. Pelaporan semacam itu harus mengikuti jalur hukum yang benar.

5. *Prohibitions on Political Activities*

Netralitas politik diperlukan bagi para manajer publik. Namun, Anda masih dapat mengambil bagian dalam pemilu yang demokratis. Ketika pejabat publik

dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan umum, seperti yang terjadi di AS pada masa pemerintahan Theodore Roosevelt, maka timbul permasalahan. Jika dilihat dari sudut pandang sumber daya manusia, kelemahan utama biasanya terkait dengan profesionalisme, kompetensi, empati, dan etika. Contohnya adalah sikap pengelola yang tidak ramah, tidak efisien, dan kurang menerima saran dan keluhan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi klien (Riskha Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022).

B. Good Governance

Terwujudnya good dan clean governance merupakan tuntutan dan amanat gerakan reformasi di Indonesia. Hal ini dilakukan karena kurangnya penyeimbang birokrasi yang jelas terhadap reformasi politik yang signifikan (Aryanti & Denok, 2023). Untuk meningkatkan efisiensi aparatur negara dan memberikan pelayanan publik, konsep tata kelola pemerintahan yang baik harus diterapkan (Nafiati et al., 2023). Faktanya, pemerintah menciptakan gagasan tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan kapasitas dalam memodifikasi perangkat administrasi guna memberikan pelayanan publik yang lebih baik, meskipun layanan publik masih dianggap sebagai mesin administrasi yang mahal, tidak efisien, dan lambat.

Munculnya isu-isu tersebut menunjukkan bahwa proses menciptakan tata pemerintahan yang baik belum berjalan seefektif yang seharusnya, dan merupakan tugas pemerintah untuk bertindak tepat waktu untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul ketika terjadi kecelakaan. Seharusnya. Selain itu, pemerintah mempunyai tugas besar untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menyelenggarakan pelayanan publik seefektif mungkin sebagai suatu badan yang menyelenggarakan administrasi publik (Zahirah & Meini, 2022).

Peningkatan kinerja pemerintahan tingkat tinggi yang diinginkan akan dapat dicapai melalui penggunaan etika administrasi publik yang paling efektif (Karina & Kusumawardhani, 2023). Oleh karena itu, para pemimpin negara harus menjunjung tinggi standar moral mereka sendiri dalam melaksanakan tugas resminya, khususnya yang berkaitan dengan etika, kesopanan, nilai-nilai, dan standar yang berkaitan dengan peraturan internal. Mereka juga perlu berperilaku baik, seolah-olah setiap manajer publik tidak berperilaku baik. Kinerja akan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip moral, dan profesionalisme akan diragukan. Sebuah sistem yang efektif perlu memiliki nilai kelembagaan untuk mencegah permasalahan penipuan seperti korupsi pejabat yang merajalela.

Dari konsepsi hingga pelaksanaan hingga penilaian, pelanggaran etika masih sangat timpang demi kepentingan tertentu. Masih terdapat anomali dalam proses penerapan tata kelola yang baik, termasuk ketidakadilan, kurangnya masukan, keterbukaan, akuntabilitas, keterlibatan, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya. Jawaban atas seluruh pertanyaan di atas menunjukkan bahwa baik etika administrasi maupun lembaga ketatanegaraan belum menjadikan etika sebagai nilai inti atau berkontribusi signifikan terhadap pengembangan pelayanan yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap etika administrasi publik.

Penerapan undang-undang, peraturan etika lainnya, dan prinsip-prinsip tertulis maupun tidak tertulis—yang berakar pada Pancasila dan UUD 1945—semuanya dianggap sebagai praktik unggulan. Istilah "pemerintahan yang baik" sering digunakan. Gagasan tentang saling ketergantungan dan interaksi antara aktor-aktor institusional yang berbeda di semua tingkatan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif, dan militer) dan sektor merupakan landasan konsep tata pemerintahan yang baik, swasta (bisnis, lembaga keuangan). Tidak ada lembaga pemerintah yang efektif yang perlu dikendalikan sepenuhnya. Dengan kata lain, landasan tata pemerintahan yang baik adalah nilai-nilai

bersama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik, yang semuanya penting bagi keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan publik yang kuat (Nur, Molina, et al., 2023). Hal ini mencakup hubungan antara negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Tingkat penerimaan suatu kebijakan ditentukan oleh partisipasi masyarakat yang merancang, bukan oleh otoritas kepemilikannya.

Gagasan mengenai tata pemerintahan yang baik bermula dari rasa ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah yang bertugas mengatur urusan masyarakat. Tergantung pada kemampuan pemerintah, masyarakat sipil, dan proses pasar, penerapan praktik tata kelola yang baik dapat dilakukan secara bertahap. Pemberian pelayanan publik merupakan salah satu cara taktis Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) harus dimulai dari lahirnya perilaku-perilaku baik para aparatur sipil negara. Apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan kode etik PNS dengan baik akan memberikan korelasi pada peningkatan disiplin pegawai dan pelayanan pada Masyarakat. ASN akan menjadikan masyarakat dalam orientasi pelayanannya dan bukan lagi orientasi pada atasan (Wijayanti & Denok Kurniasih, 2023).

PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa menelaah beberapa nilai yang melekat pada etika administrasi merupakan langkah awal menuju penerapan etika administrasi publik dan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Prinsip-prinsip dasar dalam etika pelayanan publik, seperti kejujuran, profesionalisme, dan keterlibatan masyarakat, sangat penting untuk memastikan integritas layanan publik dan menjunjung standar pelayanan yang tinggi.

Pelayanan publik yang efektif merupakan tanda tata kelola pemerintahan yang baik; ketika pelayanan publik berfungsi sebaik-baiknya, maka tata kelola pemerintahan yang baik akan terjadi secara alami, dan sebaliknya. Etika pelayanan publik dapat digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya, oleh karena itu etika merupakan hal yang sangat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan berbagai aturan ideal baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain yang berkaitan dengan etika, khususnya etika pelayanan publik, menjadi bagaimana peran etika pelayanan publik dalam pelaksanaannya. tata kelola pemerintahan yang baik terwujud. antara lain dengan mempertahankan prinsip-prinsip luhur yang merasuki masyarakat, bangsa, dan negara serta dengan berpegang teguh pada penerapan benar dan salah, baik dan buruk, serta estetika, menyikapi keindahan dan keburukan, serta benar-benar melaksanakan kewajiban pemerintah. .

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada kinerja pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi aparatur negara (Pradani & Lestari, 2022). Faktanya, pemerintah menciptakan gagasan tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan kapasitas dalam memodifikasi perangkat administrasi guna memberikan pelayanan publik yang lebih baik, meskipun layanan publik masih dianggap sebagai mesin administrasi yang mahal, tidak efisien, dan lambat. Untuk meningkatkan efisiensi aparatur negara dan memberikan pelayanan publik, konsep tata kelola pemerintahan yang baik harus diterapkan. Faktanya, pemerintah menciptakan gagasan tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan kapasitas dalam memodifikasi perangkat administrasi guna memberikan pelayanan publik yang lebih baik, meskipun layanan publik masih dianggap sebagai mesin administrasi yang mahal, tidak efisien, dan lambat.

KESIMPULAN

Birokrasi lebih mudah dan praktis menerapkan nilai-nilai good governance dalam pelayanan publik. Daripada melembagakan cita-cita ini dalam seluruh aspek operasional pemerintahan, nilai-nilai yang mendefinisikan praktik tata kelola yang baik—efisiensi, keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi—dapat diterjemahkan secara sederhana ke dalam penyediaan layanan publik. Semua komponen pemerintahan mempunyai kepentingan terhadap pelayanan publik. Ada banyak minat dan keterlibatan dalam bidang ini dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sistem pasar. Karena praktik pelayanan publik yang buruk mempunyai dampak yang signifikan terhadap ketiga aspek tata kelola, maka pelayanan publik sangat penting bagi ketiga aspek tersebut dan mempunyai kepentingan yang kuat terhadap ketiga aspek tersebut.

Kemampuan suatu pemerintah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap masa depannya, baik di tingkat federal maupun daerah. Kemampuan suatu rezim atau penguasa untuk menyenangkan individu dan memberikan layanan publik yang berkualitas seringkali menjadi faktor penentu seberapa baik mereka membangun legitimasi kekuasaan. Demikian pula, peningkatan kualitas pelayanan publik juga akan menurunkan biaya birokrasi, sehingga akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan efektivitas mekanisme pasar. Reformasi sektor publik akan mendapat dukungan luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, D., & Denok, K. (2023). *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*. 20(April), 84–95.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Budiman, Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia, & Diella Jauza. (2022). Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 64–74. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.65>
- Dt, K. (2003). Etika Pelayanan Publik. *Demokrasi*, 9(1), 61–70.
- Engkus, Ainyna Rachmadianty Azan, Alliadzar Hanif, & Anisa Tiara Fitr. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39–46. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62>
- Mandey, M. (2016). Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “Good Governance.” *Lex Administratum*, IV(2), 178–188. http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS - RJ/RBG/RBG 1995 v57_n1.pdf%0Ahttps://periodicos.ufpe.br/revistas/rbgfe/article/view/234295
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- View of IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19. (n.d.). <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/197/107>
- Wijayanti, W., & Denok Kurniasih. (2023). Penerapan Kode Etik Aparatur Sipil Negera Dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negera. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 11(1), 44–51. <https://doi.org/10.31289/publika.v11i1.9524>

- Achyarsyah, P., Nur, M., Indriyanto, E., Digdowiseiso, K., & Nor, S. M. (2023). THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTING ON FRAUD. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)*, 3(6), 2059–2065.
- Indriyanto, E., & Rosmalia, D. D. (2022). The Influence of Company Size and Profitability on Audit Delay with Public Accounting Firm's Reputation as a Moderating Variable (Empirical Study on Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange 20. I. DOI: [https://Doi.Org/10.47191/Ijmra/v5-I10-03](https://doi.org/10.47191/Ijmra/v5-I10-03).
- Jufita, T., & Meini, Z. (2022). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN PANDEMI COVID 19 TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN. *ECOBESTHA*, 1, 181–184.
- Karina, A., & Kusumawardhani, F. (2023). Analysis of Solvability, Liquidity, and Company Size on Audit Delay with Audit Quality as Moderation. *JRAK*, 15(2), 209–218.
- Limiao, L., & Lestari, R. (2022). Performance Improvement Through Motivation: Commitment Parallel Mediation Model. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(2), 127–142.
- Meini, Z., & Istikharoh, I. (2022). Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. *AkunNas*, 19(1), 28–42.
- Nafiati, D., Karina, A., & Digdowiseiso, K. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate Dan Perencanaan Pajak Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 8662–8671.
- Nugroho, G. S., Elwisam, E., & Digdowiseiso, K. (2023). Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Study of State-Owned Companies in the Banking Sector Listed on the Indonesian Stock Exchange 2018-2020. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(2), 390–405.
- Nur, M., Indriyanto, E., Digdowiseiso, K., & Hashim, H. A. (2023). The Implementation of Green Accounting in Indonesia: A Bibliometric Analysis. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND SOCIAL SCIENCE (IJEMBS)*, 3(2), 470–480.
- Nur, M., Molina, M., Indriyanto, E., Digdowiseiso, K., & Hashim, H. A. (2023). Determinants of the Selection of Accounting Conservatism in Indonesia: A Systematic Literature Review Approach. *Global Journal of Business, Economics & Social Development*, 1(2), 64–77.
- Pradani, T., & Lestari, R. (2022). Hubungan karakteristik board dan kualitas sustainability reporting yang dimoderasi oleh external assurance. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(Special Issue 3), 1158–1169.
- Subiyanto, B., Karina, A., Pramita, D. A., & Alvionita, N. P. (2022). The Effect of Company Profitability and Size on Corporate Social Responsibility Disclosure (Study on Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2020 Period). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 12355–12361.
- Susilo, B., & Ria, R. (2022). Trends of agency theory in accounting, financial and management research: Systematic literature review. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2).
- Zahirah, R., & Meini, Z. (2022). PENGARUH OPINI AUDIT, PERGANTIAN AUDITOR, AKTIVITAS PERSEDIAAN, DAN PANDEMI COVID-19 TERHADAP AUDIT DELAY (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 16–27.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License